

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pemerintah di setiap negara, dengan negara berkembang ataupun maju, berusaha untuk menunjukkan peningkatan kualitas setiap tahunnya. Ini karena setiap negara membutuhkan pemerintahan yang baik dan mampu menjalankan tugasnya. Dalam dunia yang berkembang pesat ini, setiap negara, termasuk Indonesia, sangat memperhatikan hal ini untuk menunjukkan pemerintahan yang jauh lebih baik.

Dengan ketersediaan sumber daya yang cukup dari Kepala Daerah, fungsi Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan sepenuhnya. Sumber daya ini harus diberikan melalui Undang-Undang yang menata bagaimana peninjauan keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat. Sumber daya yang diberikan kepada setiap urusan pemerintahan harus dimasukkan ke dalam sumber keuangan Pemerintahan Daerah.

Seperti mana dirancang dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah melakukan tugas pemerintah yang berada di bawah kewenangannya selain kepentingan pemerintahan yang membentuk tugas pemerintah. Dalam menjalankan tugas pemerintahan demi membentuk kewenangan daerah itu, Pemerintahan Daerah memiliki tugas membantu melalui penuaian otonomi seluas-luasnya demi menata serta mengelola pemerintahannya sendiri.

Selanjutnya, selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 berkenaan dengan Manajemen Keuangan Desa. Keuangan desa dilangsungkan selama kurun satu Tahun Anggaran akan diawali pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember, melalui prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Selain itu, pengelolaan keuangan desa dilangsungkan dengan teratur dan tertib anggaran. Laporan keuangan yang dikemukakan tentu hendaklah berkualitas, mengingat sedemikian banyak yang masih menggantungkan suatu informasi dari laporan keuangan yang di terbitkan lewat Pemerintahan Daerah melalui relevansi yang berbeda-beda. Suatu laporan

keuangan dianggap berkualitas setelah menunaikan karakteristik kualitas informasi keuangan, laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang bisa memperoleh output berupa informasi keuangan yang berfungsi sebagai pengambilan keputusan.

Pemerintah juga diharuskan untuk dapat menciptakan laporan keuangan yang berkualitas, sebab suatu bayangan untuk dapat menyelami apakah suatu pemerintah telah berjalan dengan baik adalah dari laporan keuangannya. Seperti yang diisyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas disuatu pemerintah memiliki kriteria karakteristik yang terdiri dari (1) Relevan, apabila laporan keuangan itu mengandung informasi yang mungkin berdampak antara keputusan pengguna dengan cara menopang mereka memeriksa kejadian yang terjadi sekarang atau sebelumnya dan bisa memperkirakan masa depan maka laporan keuangan dianggap relevan, (2) Andal, apabila laporan keuangan dapat dipakai demi pengambilan keputusan maka laporan keuangan itu dianggap andal, (3) Dapat dibandingkan, laporan keuangan harus sebanding seperti laporan keuangan periode lampau seperti bisa dibandingkan dengan keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, (4) Dapat dimengerti, laporan keuangan tersebut dapat dimengerti apabila pengguna maupun pembaca dapat memahami informasi dalam laporan keuangan tersebut.

Media yang dipakai oleh entitas pelaporan keuangan pemerintah demi mempertanggungjawabkan kinerja keuangan terhadap publik (pihak yang berkepentingan) adalah Akuntansi Sektor Publik. Salah satu cara demi menjalankan akuntabilitas publik ialah dengan membuat laporan keuangan, yang merupakan tugas utama Akuntansi Sektor Publik. Proses penghimpunan, pemrosesan, serta penyampaian informasi yang membantu dalam pengambilan keputusan serta penilaian kinerja bisnis dikenal sebagai akuntansi dan laporan keuangan. Karena permintaan informasi pada sektor publik lebih beragam, informasi tidak hanya tentang sistem akuntansi organisasi dan informasi keuangan yang dihasilkan. Dalam proses pengambilan keputusan, informasi non-moneter layaknya ukuran output pelayanan yang dipertimbangkan.

Selain itu, laporan keuangan berkualitas tinggi juga tergerak oleh kemampuan Sumber Daya Manusia. Laporan keuangan adalah produk yang dapat diwujudkan oleh siapa pun yang bekerja dalam bidang akuntansi atau disiplin ilmu lainnya. Disamping itu, Sumber Daya Manusia yang lebih mahir diperlukan demi memanifestasikan laporan keuangan yang lebih baik. Begitu pun dengan entitas pemerintahan, demi memperoleh laporan keuangan daerah akan bemutu tinggi, diinginkan Sumber Daya Manusia kian mengerti juga mahir di bidang akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, serta organisasi yang berkaitan dengan pemerintahan.

Untuk pemrosesan keuangan daerah yang efektif serta efisien, SKPD perlu mempunyai Sumber Daya Manusia yang kompeten melalui motif kerangka akuntansi yang kuat, berpengalaman dalam keuangan, dan sering mengikuti pelatihan dan pendidikan. Hal ini dibutuhkan untuk memulai penggunaan metode akuntansi yang sudah ada. Manusia yang berbakat tersebut akan dapat menangkap logika akuntansi yang tepat. Jika Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah tidak memegang pemahaman yang tepat berkenaan akuntansi dan tidak menerapkan logika akuntansi yang tepat, maka laporan keuangan akan dibuat dengan kekeliruan dan tidak sesuai dengan standar Peraturan Pemerintah.

Unit pemerintah paling dasar terhadap strata yang diperkenankan pada pemerintahan nasional adalah Pemerintah Desa. Ini juga dapat diartikan bahwa Pemerintah Desa adalah organisasi yang paling depan pada upayanya untuk menyelenggarakan pelayanan publik serta yang berdekatan dengan masyarakat lantaran Pemerintah Desa langsung mengayomi masyarakat. Akibatnya, Pemerintah Desa harus meninggikan kinerjanya pada pengendalian pelayanan publik agar sesuai dengan angan-angan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan bagian dari lembaga Pemerintah Pusat, memiliki tanggung jawab strategis untuk mengawasi masyarakat pedesaan sehingga pembangunan pemerintah dapat dicapai. Banyak faktor yang menentukan kualitas laporan keuangan Pemerintah Desa, seperti Sumber Daya Manusia yang bermutu tinggi dan penyampaian laporan keuangan setimpal demi parameter yang ditetapkan sudah sepatutnya menjadi perhatian Pemerintah Desa. Laporan keuangan

Pemerintah Desa yang baik dan bermutu tinggi menunjukkan bahwa Kepala Desa dan aparatur pengelola keuangan bertanggung jawab sesuai dengan wewenang mereka untuk menjalankan tugas pengelolaan organisasi. Artinya, kualitas Laporan keuangan Pemerintah Desa benar-benar termotivasi melalui kualitas aparatur desa itu sendiri.

Beriringan dengan lajunya pembangunan serta bertambah rumitnya tugas Pemerintah Daerah yang sudah pasti membutuhkan dana yang lumayan, sehingga mencuat konsep untuk menimba dan mengendalikan Pendapatan Asli Daerah dimana Pendapatan Asli Daerah menyiratkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi, pajak, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah. Tujuan dari PAD adalah demi menyerahkan peluang kepada daerah bakal mendapatkan dana dalam melaksanakan Otonomi Daerah menjadi bagian dari prinsip desentralisasi. Independensi dalam hal pembelanjaan diperoleh dari peningkatan pendapatan daerah yang kian diamati, terlebih dengan diberlangsungkan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 berkenaan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 berkenaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang direvisi sebagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkenaan Pemerintahan Daerah dan Undang Undang berkenaan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah. Atas berlangsungnya Undang-Undang tersebut mengimplikasikan bahwa Pemerintah Daerah memegang kontribusi esensial pada penyelenggaraan daerah oleh pemerintah.

Proses analisis serta juga evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan serta kinerja keuangan yang dilangsungkan oleh Pemerintah Daerah telah tergambar berawal Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Parameter mengenai kemampuan juga kinerja keuangan pun bisa memberikan hasil terkait meningkat atau tidaknya pemrosesan keuangan yang dilangsungkan Pemerintah Daerah serta sekaligus menjadi dasar dalam rangka pengambilan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan ekonomi nasional.

Sumber Daya Manusia mencerminkan salah satu dari banyak hal yang memutuskan kapasitas laporan keuangan Pemerintah Desa akan memadai serta penyampaian laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sudah sepatutnya menjadi perhatian Pemerintah Desa. Laporan keuangan Pemerintah Desa yang baik serta bermutu menunjukkan Kepala Desa dan aparatur pengelola keuangan bertanggungjawab seperti wewenang yang telah diberikan untuk memenuhi tugas manajemen organisasi.

Namun pada kenyataannya, instansi pemerintah suatu desa maupun daerah penataan personil kepegawaian sering dilangsungkan tidak sesuai dengan keperluan, baik secara kuantitas ataupun kualitas. Contohnya saja pada aspek kualitas, penataan personil aparatur desa seringkali tidak serasi mengenakan prinsip *“The right man on the right place”* yang menganjurkan penempatan dilangsungkan dengan kualitas personil yang kompeten dan memiliki kemampuan ahli di bidangnya, bahkan tidak jarang aparatur pemerintahan memilih sanak saudara, terutama dalam pangkat maupun jabatan pemerintahan tertentu.

Perangkat desa yang berkualitas perlu memiliki kemampuan demi melaksanakan peranan atau kewenangannya agar target yang diharapkan tercapainya secara efektif dan efisien. Perangkat desa yang menangani masalah keuangan harus memiliki lebih dari sekedar pengetahuan tentang penatausahaan anggaran. Mereka harus memiliki pemahaman tentang jenis transaksi yang terjadi dan bagaimana transaksi tersebut berdampak pada rekening-rekening dalam laporan keuangan Pemerintah Desa. Fenomena tersebut tentu bukan hanya tindakan melawan hukum dengan penyalahgunaan kekuasaan, namun juga dapat mempengaruhi kualitas kinerja pegawai dan tingkat pelaporan keuangan Pemerintah Desa yang baik.

Unsur-unsur yang mempengaruhi kapasitas laporan keuangan oleh pengimplementasian Akuntansi Sektor Publik untuk memperlihatkan bahwa pelaksanaan akuntansi pada rangka penerapan sistem dan teknik akuntansi, penyampaian komponen laporan keuangan seperti tujuan laporan keuangan sangat berpengaruh positif dalam upaya memperoleh laporan keuangan yang bernilai tinggi. Selain itu kompetensi Sumber Daya Manusia mencerminkan tingkat

keberhasilan mutu laporan keuangan yang dihasilkan yang berarti semakin bagus kemampuan Sumber Daya Manusia lantas hendak melaju tinggi tingkat kapasitas laporan keuangan akan diwujudkan.

Kemampuan keuangan daerah terhadap proses keuangannya dicurahkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah saat memvisualkan kemampuan Pemerintah Daerah ketika mengurus kesibukan yang menjalankan tugas pembantuan serta bagaimana keuangan daerah dapat dikelola. Pemerintah daerah patut menguasai kemampuan untuk mengurus semua aktivitas pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan, termasuk pengklasifikasian dan penggarapan rumah tangganya sendiri. Adapun demikian, kemampuan keuangan daerah mesti cakap menanggung operasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Pada proses Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan harus memangku pemerintahan dengan efisien dan efektif, serta sanggup meningkatkan kedudukan masyarakat dalam pembangunan, dan meninggikan keseimbangan dan pemerataan. Mereka juga harus memaksimalkan potensi masing-masing daerah.

Indikator dari kemampuan keuangan daerah merupakan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017. Kinerja keuangan sendiri adalah gambaran dari siapa pemerolehan implementasi aktivitas, rencana, kecakapan dalam menciptakan mangsa, target, misi, dan visi organisasi. Menurut Mahmudi (2010), analisis rasio keuangan yang hendak dipakai demi melangsungkan analisis atas laporan keuangan pemerintah di daerah mencakup Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Indeks Kemampuan Rutin, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Pertumbuhan serta Rasio Efektivitas. Amat penting untuk menjalankan pengukuran kinerja keuangan sendiri demi menaksir responsibilitas Pemerintah Daerah pada upaya pemrosesan keuangan daerah. Ini juga berguna untuk membuat keputusan karena memperlihatkan akuntabilitas pelaporan atas sumber daya yang diproses pemerintah.

Sebagai bagian dari kearifan Otonomi Daerah, terpaut dengan efektivitas belanja daerah mampu sebagai salah satu standar utama kesuksesan dalam pemrosesan Otonomi Daerah sendiri, terpenting dalam hal seberapa besar kebijakan

desentralisasi diawasi oleh Pemerintah Daerah agar becus membantu tercapainya tujuan nasional dalam upayanya meningkatkan ketertiban masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum di daerah.

Dengan semakin meningkatnya belanja daerah, maka dibutuhkan juga ketelitian dalam melihat serta memperoleh sumber pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dan dari sini kita menentukan apakah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah mampu dalam memaksimalkan setiap sumber pendapatan yang ada dalam upaya membantu dari adanya pelaksanaan Otonomi Daerah.

Selain unsur-unsur layaknya kesiapan Sumber Daya Manusia, kelembagaan, proses, prosedur, juga sarana dan prasarana pendukung. Untuk dapat memanifestasikan otonomi yang luas, sejati serta bertanggung jawab seperti disusun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mayoritas bergantung akan kekayaan daerah. Tingginya kontribusi PAD terhadap APBD secara umum disebabkan juga oleh tingginya kemampuan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menggali keuangan daerah.

Pada hakikatnya, semakin tinggi kontribusi PAD terhadap APBD dapat mengindikasikan bahwa dependensi daerah pada Pemerintah Pusat semakin rendah. Dengan peningkatan PAD, daerah tidak harus berkompetisi untuk menciptakan pajak baru. Tetapi, daerah harus cukup cermat untuk mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber potensial dan kemampuan yang mereka miliki. Sebaliknya, jika Pemerintah Daerah tidak dapat mengidentifikasi dan menggunakan akar pendapatan yang dapat diperoleh, itu dapat menyebabkan kemampuan keuangan daerah menjadi rendah. Alhasil, ini akan mengganggu proses pelaksanaan Otonomi Daerah.

Faktor pendapatan daerah merupakan pra syarat yang cukup penting dalam diadakannya penyelenggaraan otonomi akan merata, obyektif serta konsisten sebagaimana didelegasikan pada Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, lagi pula faktor beda semacam kesediaan Sumber Daya Manusia, institusi, koordinasi dan kebijakan bersama peralatan atau sarana dapat menyokong keterbatasan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menggali keuangan

daerah dari potensi yang dapat mengakibatkan rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. Apalagi bagi kabupaten dengan potensi ekonomi berbasis perkebunan seperti Muaro Jambi.

Kabupaten Muaro Jambi dipilih peneliti menjadi objek penelitian ialah karena, dapat dilihat dari letak geografisnya dimana Kabupaten Muaro Jambi adalah Kabupaten/Kota yang letaknya paling dekat dengan pusat Ibukota Provinsi Jambi dimana disini peneliti ingin melihat perkembangan suatu kabupaten yang berada paling dekat dengan Kota Jambi. Dalam hal ini Muaro Jambi sendiri memiliki potensi yang cukup melimpah dikarenakan terletak berdekatan dengan Kota Jambi dimana banyak pengusaha berinvestasi di Kabupaten Muaro Jambi melalui perumahan Citra Raya City (Mendalo), perkebunan kelapa sawit, sampai ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Kabupaten Muaro Jambi juga memiliki Universitas Jambi (UNJA) serta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (UIN STS Jambi). Adanya Universitas diatas dapat meningkatkan pendapatan bagi warga sekitar kampus melalui pengadaan tempat tinggal berupa kos maupun rumah sewa, bukan hanya tempat tinggal, masyarakat sekitar juga dapat meningkatkan perekonomian melalui wisata kuliner, *laundry* dan lain lain.

Berikut merupakan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2018-2022:

Tabel 1. 1
Realisasi APBD Kabupaten Muaro Jambi 2018-2022

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Pendapatan Transfer	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2018	1.319.276.321.829	90.305.498.362	1.182.907.060.245	46.063.763.222
2019	1.400.690.479.386	93.794.601.240	1.254.715.126.081	52.180.752.065
2020	1.323.380.846.117	92.797.887.531	1.176.262.968.498	54.319.990.088
2021	1.388.378.790.732	110.745.449.485	1.228.110.270.313	49.523.070.934
2022	1.350.480.700.133	108.278.810.236	1.242.053.734.050	152.155.847

Sumber: BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi 2018-2022 (data diolah, 2024)

Terlihat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2018 hingga tahun 2022 menyumbang sekitar 7,3 % dari total pendapatan daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Kabupaten Muaro Jambi masih luar biasa bersandar pada tunjangan Pemerintah Pusat. Dari data di atas juga dapat kita

simpulkan bahwa PAD pada Kabupaten Muaro Jambi tergolong rendah. Faktor PAD suatu daerah dapat dinyatakan rendah atau bergantung terhadap Pemerintah Pusat salah satunya adalah belum sempurnanya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya mengoptimalkan penataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maupun pajak yang harus digali suatu daerah.

Penelitian ini sendiri berdasarkan penelitian yang dilangsungkan oleh I Putu Santika, Ida Bagus Made Punia Adnyana, pada bulan Juni tahun 2022 yang meneliti tentang Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Badung Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Pada hasil penelitian ini sendiri memperlihatkan bahwa, berdasarkan tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Badung termasuk sangat baik melalui nilai rasio berbilang 489,8% dan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Badung periode 2015 hingga 2019 terlihat sangat baik melalui pola hubungan *Delegatif*. Sedangkan jika di lihat dari tingkat rasio efisiensi keuangan pemerintah Kabupaten Badung melewati peninggian yang tampak dari persentase rasionya, biarpun di tahun 2019 menghadapi kemerosotan sebanyak 1,62%, namun kinerja pemerintah Kabupaten Badung masih berada di kriteria sangat efisien. Dan jika dibuktikan dari tingkat efektifitas keuangan berada di kriteria efektif adapun rasio efektifitas berbilang 95%, situasi ini bermakna bahwasanya target pendapatan yang dirancang sudah berhasil dimanifestasikan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dirujuk karena beberapa hal. Berdasarkan pada saran peneliti terdahulu yang mengharapkan peneliti di masa mendatang untuk mengaplikasikan indikasi dalam kinerja keuangan daerah yang lain salah satunya rasio keserasian serta juga rasio derajat desentralisasi. Penelitian ini tidak hanya menganalisis kinerja keuangan daerah melainkan juga menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Objek pada penelitian ini pun berbeda dari studi penelitian lebih dahulu dimana penelitian sebelumnya berobjek pada Kabupaten Badung sedangkan penelitian ini berobjek pada Kabupaten Muaro Jambi. Variabel kemampuan keuangan sendiri dipilih mendampingi variabel kinerja dikarenakan menurut peneliti kemampuan serta kinerja keuangan tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan dimana analisis kemampuan keuangan berarti menganalisis seberapa besar kemampuan dari Pemerintah Daerah saat

mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah menganalisis hasil kerja dari pemerintahan apakah telah sesuai berkenaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sudah diputuskan sedari awal tahun. Maka ini dapat dikatakan pada hasil analisis akan menunjukkan apakah benar jika tingkat kemampuan keuangan yang tinggi juga hendak menunjukkan tingkat kinerja keuangan yang tinggi begitu pula sebaliknya jika tingkat kemampuan keuangan rendah juga akan menunjukkan tingkat kinerja keuangan yang rendah.

Berdasarkan paparan di atas, peneliti terpikat untuk melangsungkan penelitian dengan judul **“Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi”**.

1. 2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah disampaikan diatas, lantas masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi?

1. 3. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, lantas tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.
2. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

1. 4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihendaki bisa dicapai dari penelitian ini, yaitu:

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan mampu menambah wawasan keilmuan peneliti mengenai kemampuan keuangan serta kinerja keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

b. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Hasil dari penelitian ini dimaksudkan bisa sebagai salah satu masukan dan pertimbangan dalam kemampuan keuangan maupun kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini dimaksudkan terampil sebagai bahan referensi serta juga perbandingan bagi peneliti lain pada bidang yang sama di masa mendatang.